



Radar Bali, "Pertahankan WTP 12 Kali Beruntun, Bupati Kembang Perkuat Tata Kelola APBD Jembrana," Jawa Pos, (Negara: 10 Juni 2026), hlm. 8.

Pertahankan WTP 12 Kali Beruntun, Bupati Kembang Perkuat Tata Kelola APBD Jembrana

Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kukuh antara Pemkab Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta segenap stakeholdernya."

I MADE KEMBANG HARTAWAN
Bupati Jembrana



PERTAHANKAN CAPAIAN: Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan (kiri) bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi (kanan) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).

NEGARA, Radar Bali - Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).

Meskipun mencetak capaian gemilang, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan memberikan penekanan kuat bahwa opini WTP ini jangan hanya dipandang sebagai sebuah piala penghargaan, melainkan sebagai standar kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, WTP yang diraih hari sebenarnya melalui proses yang panjang. Kita sudah mulai mendapatkan opini WTP ini sejak 12 tahun yang lalu dan berhasil mempertahankannya hingga kini.

"Opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan untuk tata kelola APBD yang lebih baik," tegas Bupati Kembang.

Kembang juga menyebut WTP adalah standar minimum transparansi yang wajib dipenuhi, jadi bukan sekadar ajang pamer penghargaan. Capaian ini dinilai sebagai pelecut kerja bersama agar lebih baik lagi kedepan.

"Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kukuh antara Pemkab Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta segenap stakeholdernya," sambungnya.

Selanjutnya Pemkab Jembrana berkomitmen penuh untuk menjadikan catatan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola ke depan.

Di antaranya, anggaran APBD akan terus dioptimalkan melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi

mewujudkan visi Jembrana Maju, Harmoni, Bermartabat.

Penyerahan LHP ini dilakukan serentak oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang juga berhasil mempertahankan predikat WTP.

Satria Perwira mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak cepat berpuas diri. Selain wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, pemerintah daerah dituntut untuk merancang program yang dampaknya be-

nar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan masyarakat yang lebih baik," ucapnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Jembrana dalam prosesi penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi serta Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani. (bas/san)